

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Agussalim Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007, cetakan-1
- Angriani Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha ilmu 2012, cetakan-1
- B. Syafuri, *Pemikiran Politik dalam Islam*, Serang, FSEI Press, 2010.
- Budarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cetakan
- Djazuli A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Keemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta , Kencana Prenada Media Group, 2003, cetakan ke-3.
- Doyo Ayu Pratiwi, *Peran Retribusi Parkir Pasar Wage Purwokerto dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, cetakan ke-1.
- Inu Kencana, Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintahan*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2008, cetakan ke-2
- Ismira, *Konsep Otonomi Daerah dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017
- Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2013, Cetakan ke-6.
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, cetakan ke-7.

- Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT Grasindo, 2007, cetakan ke-2.
- Nyoman I Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2013, Cetakan ke-2.
- Setawan Irfan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, eneribit WR, 2018, Cetakan-1
- Sirajudin, AnisIbrahim, Shinta Handiyantina, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press, 2016.
- Sukarja Ahamad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014Cetakan-2
- Thoha Miftah, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, cetakan ke-1.
- Pujianto Ahmad, *Tinjaun Hukum Siyasah dan Sistem Demokrasi atas Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Dakam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta)*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2014
- Widjaja A.W., *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cetakan-1
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Quran Revisi Terjemaah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Penerbit Halim 2013.
- Zaenal Entol Mutaqqin, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Pusat Penelitian Penerbitan Lembaga Pemelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014.
- Zaidan Nawaai, *Manejemen Pemerintahan*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Penyelenggaraan
Dekonsentrasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.

Jurnal

Agus M. Santoso, *Otonomi di Negara Kesatuan Republik
Indoonesia*. Vol . 9 No. 9, h. 420

H. Ahmadi Dardiri, 2017, *Konsepsi Pembagian Kekuasaan Negara
Islam Khilafah Menurut Hizbut Tahrir dan Kemungkinan
Implementasinya di Indonesia*, Vol XVI No 2.

Muin Fakhul , 2014, *Otonomi Daerah dalam Prespektif Pembagian
Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan
Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 No 4.

- Nadira Sakinah, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Vol 1 No 1 Tahun (2013), Jurnal Politik Profetik.
- Rouf Abdul Alauddin Said, 2015, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945*, Fiat Justisia, Vol 9 No 4.
- Sanjaya William, *Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Vol 2, No 3 (2014), Padjadjaran Ilmu Hukum
- Ujang, 2012, *Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik (Potential for abuse of authority by the Administration Officer of The State of Public Policy Making and Execution)*, Wawasan Hukum, Vol 15 No 20.